KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Saudi kenakan denda, calhaj wajib penuhi syarat kesehatan
Tanggal : Jumat, 16 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Saudi Kenakan Denda

Calhaj Wajib Penuhi Syarat Kesehatan


FOTO: DPR.GO.ID

Nanang Samodra

SENAYAN menyoroti pemenuhan istithaah atau kemampuan kesehatan calon jemaah haji (calhaj) sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Jemaah yang diberangkatkan mesti benar-benar memenuhi syarat kesehatan agar tidak menimbulkan persoalan selama berada di Arab Saudi.

Anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra mengingatkan, Indonesia menghadapi persoalan denda sekitar Rp 60 miliar terkait pengiriman jemaah yang masuk dalam sembilan kriteria kesehatan yang tidak diperbolehkan oleh Pemerintah Arab Saudi. "Tapi kita masih mengirim. Nah, ini harus hati-hati, jangan sampai terulang lagi," tegas Nanang di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi memblokir dana sebesar 14 juta riyal atau sekitar Rp 66,2 miliar dari dana Rp 4 triliun yang ditransfer Indonesia untuk uang muka atau *down payment* (DP) penyelenggaraan ibadah haji 2027. Pemblokiran itu berkaitan dengan temuan Saudi terkait pelanggaran asuransi pada penyelenggaraan haji 2026.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pemblokiran dana itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran asuransi terhadap lebih dari 600 jemaah Indonesia di 2026. "Jemaah tersebut tetap berangkat meski memiliki sembilan kondisi penyakit yang dinilai tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk masuk ke Arab Saudi," ujar Dahnil di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dahnil merinci sembilan kondisi kesehatan yang dimaksud. Pertama, gagal ginjal, gagal jantung, penyakit paru-paru kronis, penyakit hati atau sirosis hati dan gagal hati, penyakit saraf dan psikiatri berat. Kemudian, demensia, kehamilan tiga bulan atau lebih, penyakit menular seperti TBC dan kanker aktif yang sudah menjalani kemoterapi.

Nanang melanjutkan, penguatan pemeriksaan kesehatan juga membutuhkan kejujuran dari calhaj mengenai kondisi kesehatan masing-masing. Hal tersebut penting agar hasil pemeriksaan benar-benar menggambarkan kondisi calhaj yang akan diberangkatkan.

Ia mencontohkan adanya kasus calhaj yang baru diketahui hamil enam bulan menjelang keberangkatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui sampel urine yang digunakan pada saat pemeriksaan kesehatan sebelumnya bukan berasal dari jemaah tersebut, melainkan dari urine suaminya yang dibawa ke rumah sakit.

Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan pemeriksaan kesehatan mesti dilakukan secara serius dan calhaj harus jujur mengenai kondisi kesehatannya. "Hal-hal seperti itu perlu dijaga, sehingga betul-betul kondisi kesehatan dari para jemaah itu sendiri. Jangan sampai kita didenda lagi seperti tahun ini," ucap Nanang. ■ TIF